

“ Kalau dakwah hanya marah pada pejabat, apa bedanya dengan oposisi politik biasa — dan apa yang dakwah seharusnya tambahkan? ”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

Pekan ini ruang publik dipenuhi kabar yang berat: dugaan korupsi dana program Makan Bergizi Gratis dengan surat dari penjara seorang mantan pejabat Badan Gizi Nasional, proyek biodiesel-sawit di Papua yang mengkonversi hutan masyarakat adat, RUU Polri yang dibahas dalam waktu singkat namun menambah tujuh materi substansial, gugatan warga Sumatera atas keputusan kebijakan yang

menyentuh ruang hidup mereka, dan laporan HAM yang memburuk. Respons di lini masa terbelah antara rage-post yang menumpahkan kemarahan dan apatisme yang memilih diam. Pertanyaan yang layak diajukan: di antara dua kutub itu, mana yang sebenarnya dakwah. Tradisi sirah menyimpan satu jawaban lewat wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu — khalifah keempat — yang meninggalkan amanahnya dengan kalimat sederhana tentang takwa, sholat, dan menjaga umat; jauh dari kemarahan retorika, namun justru menjadi tolok ukur yang awet melampaui zamannya.

Lensa pertama — ilmu politik. Kebijakan publik dievaluasi pada tiga lapisan: desain (apakah peraturannya koheren), eksekusi (apakah implementasinya bersih), dan distribusi (siapa yang akhirnya menerima manfaat dan siapa yang menanggung beban). Kebanyakan rage-post di linimasa fokus pada satu lapisan — biasanya skandal eksekusi — dan mengabaikan dua lainnya. Implikasi metodologisnya: kritik konstruktif menggambarkan ketiganya secara seimbang, bukan hanya menyoroti satu titik api. Celahnya jelas: kerangka tiga lapisan ini berhenti pada "bagaimana", belum menjawab "untuk siapa kebijakan ini sebenarnya dirancang". Pertanyaan terbuka: bagaimana model teknokratis itu dilengkapi dengan etika yang menjawab pertanyaan tujuan?

Lensa kedua — sosiologi gerakan. Sejarah gerakan mahasiswa Indonesia — 1966, 1998, hingga gelombang sekarang — menunjukkan bahwa yang sustainable selalu kombinasi tiga unsur: advokasi formal (jalur parlemen dan pengadilan), dokumentasi (data lapangan, jurnalisme warga), dan komunitas lokal (jaringan yang menahan tekanan jangka panjang). Rage-post sendirian bukan gerakan; ia gejala. Implikasinya, dakwah politik yang sehat melengkapi jurnalisme dan advokasi dengan satu dimensi yang sering hilang — dimensi moral, bahasa amanah dan tanggung jawab. Celahnya: dimensi moral itu kadang menyamarkan

kepentingan politik praktis di baliknya. Pertanyaan terbuka: bagaimana memilah ketulusan dakwah dari kemasan moral yang digunakan untuk kepentingan kelompok?

Lensa ketiga — sejarah khilafah ar-rasyidin. Empat khalifah pertama menghadapi tekanan politik yang struktur dasarnya serupa dengan tekanan hari ini: Abu Bakar dengan pemberontakan internal, Umar dengan dinamika perluasan wilayah, Utsman dengan fitnah administratif, dan Ali dengan perang saudara. Wasiat Ali sebelum wafat hanya berisi empat hal: takwa kepada Allah, jaga sholat, ihsan kepada yang lemah, dan jaga umat dari perpecahan. Tidak ada satu pun tentang membalas musuh politik. Implikasinya, kerangka klasik itu menjadi tolok ukur yang justru lebih sederhana dari teori politik modern — empat parameter yang bisa diuji pada kebijakan apa pun. Celahnya: konteks abad ke-7 Arab bukan Indonesia modern. Pertanyaan terbuka: bagaimana kategori-kategori itu ditranslasi ke kebijakan negara-bangsa kontemporer tanpa kehilangan jiwanya?

Lensa keempat — teologi amanah. Kebijakan publik, dalam kerangka tradisi, adalah amanah — titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. QS. Al-Ma'aarij ayat 32 memuji golongan yang memelihara amanat dan janji mereka. Tradisi tidak memberi blueprint kebijakan modern — ia memberi kategori: amanah (titipan), mizan (timbangan keadilan), ihsan (kebaikan yang melampaui kewajiban), dan hudud-Allah (batas yang tidak boleh dilampaui). Implikasinya, dakwah politik yang sehat menghidupkan kategori-kategori itu dalam percakapan publik, bukan mengiklankan partai atau tokoh. Celahnya: kerangka ini efektif terutama bagi mereka yang menerima tradisi sebagai otoritas. Pertanyaan terbuka: bagaimana kategori-kategori itu ditawarkan kepada publik plural tanpa diposisikan sebagai pemaksaan?

Pada tataran praktis, ruang mahasiswa untuk masuk ke percakapan ini sebenarnya cukup luas. Di kos atau asrama, halaqah kecil mingguan bisa diisi dengan satu kebijakan publik yang dibedah pakai empat parameter Ali — takwa, ibadah, ihsan kepada yang lemah, jaga

persatuan — bukan dengan rage-post bersama. Di kelas, tugas paper dan diskusi tematik adalah ruang aman untuk menulis analisis tiga lapisan (desain–eksekusi–distribusi) terhadap kebijakan pekan ini, termasuk MBG, RUU Polri, atau biodiesel Papua. Di organisasi BEM dan LDK, kolaborasi lintas-unit — kajian, riset, advokasi — bisa diarahkan untuk menghasilkan satu kertas posisi yang bahasanya tetap rahmah. Bagi yang sedang magang di lembaga pemerintah, NGO, atau media, sikap dewasa adalah mendokumentasikan dari dalam dengan jujur, bukan membocorkan dengan emosi. Di feed personal, satu thread reflektif yang berbasis kategori amanah lebih membekas daripada sepuluh repost marah. Dan satu praktik yang sering dilupakan: menambahkan doa untuk para pemimpin dalam sholat — bukan sebagai cap stempel, tetapi sebagai pengingat bahwa nasib bangsa pada akhirnya bergantung pada hidayah, bukan hanya pada strategi.

Di antara rage-post dan apatis ada ruang ketiga yang sering kosong: advokasi dewasa yang didasari kerangka amanah. Tradisi sirah memberi wasiat Ali sebagai snapshot tolok ukur — empat kalimat yang lebih awet dari ribuan utas marah. Mahasiswa muslim hari ini, dengan akses literasi, jaringan kampus, dan ruang digital yang belum pernah dimiliki generasi sebelumnya, punya peluang masuk ke ruang itu — bukan untuk menggantikan kemarahan dengan diam, melainkan menggantinya dengan suara yang lebih panjang nafasnya.